



## POLARISASI POLITIK DALAM ERA MEDIA SOSIAL: KAJIAN BIBLIOMETRIK ETIKA KOMUNIKASI POLITIK DAN RELEVANSI SIYASAH SYAR'IIYAH

Aris Suhendar<sup>1\*</sup>, Krissi Wahyuni Saragih<sup>2</sup>, Ahmad Bakri<sup>3</sup>, Nurul Hikmah<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Simalungun, Pematang Siantar, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia

\*Corresponding Author: [arissouth0694@gmail.com](mailto:arissouth0694@gmail.com)\*

### Article Info

#### Article history:

Received : 19 April 2026

Acceptance : 24 April 2026

Published : 24 April 2026

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

#### Cara mengutip:

Suhendar, A., Saragih, W. K., Bakri, A., Hikmah, N. (2026). Polarisasi Politik dalam Era Media Sosial: Kajian Bibliometrik Etika Komunikasi Politik dan Relevansi Siyasa Syar'iyah. MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 25-38.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji polarisasi politik dalam era media sosial melalui pendekatan bibliometrik serta menelaah relevansi prinsip Siyasa Syar'iyah dalam etika komunikasi politik. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya peran media sosial dalam memperkuat echo chamber, filter bubble, misinformasi, dan disinformasi politik yang memperdalam perpecahan sosial. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan dukungan aplikasi Publish or Perish dan analisis visual bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap literatur periode 2015-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema dominan dalam literatur global berpusat pada media sosial, fake news, political disinformation, algorithm, dan participation. Namun, integrasi nilai-nilai etika komunikasi Islam, khususnya Siyasa Syar'iyah, masih sangat terbatas dalam diskursus akademik. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip keadilan, kejujuran, musyawarah, persatuan, dan tabayyun memiliki relevansi kuat sebagai landasan normatif untuk membangun komunikasi politik digital yang lebih etis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

**Kata Kunci:** Polarisasi politik, Media sosial, Etika komunikasi politik, Bibliometrik, Siyasa Syar'iyah.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform utama dalam menyebarkan informasi politik, namun juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan polarisasi politik (Papathanassopoulos & Giannouli, 2025; Yarchi et al., 2024). Fenomena ini ditandai dengan terbentuknya "echo chambers" dan "filter bubbles" yang memperkuat bias konfirmasi individu, sehingga memperdalam jurang perbedaan pandangan politik di masyarakat. Studi oleh Etim-James menunjukkan bahwa media

sosial memperkuat polarisasi melalui mekanisme ini, yang berdampak pada meningkatnya konflik sosial dan menurunnya kualitas diskursus publik (Demirduzen, 2025). Lebih lanjut, penelitian oleh Qureshi & Bhatt (2024) mengungkapkan bahwa pengguna media sosial cenderung mengekspos diri mereka pada informasi yang sejalan dengan pandangan mereka, menghindari perspektif yang berbeda, yang pada akhirnya memperkuat polarisasi politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai katalisator dalam memperdalam perpecahan politik di masyarakat (Suhendar et al., 2023; Taneja, 2024).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas dampak media sosial terhadap polarisasi politik, masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait integrasi nilai-nilai etika komunikasi politik berbasis Islam, khususnya prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*. *Siyasah Syar'iyah*, sebagai doktrin politik Islam yang menekankan pada keadilan, maslahat, dan persatuan, belum banyak diadopsi dalam diskursus etika komunikasi politik di era digital (Mahmad Robbi & Syed Azman, 2025; Syam et al., 2024). Penelitian oleh Din et al (2024) menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* dalam konteks politik kontemporer untuk mencapai kesejahteraan dan menghindari kerusakan. Namun, dalam konteks komunikasi politik di media sosial, integrasi nilai-nilai ini masih minim, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren dan perkembangan literatur global terkait etika komunikasi politik dan polarisasi politik di era media sosial melalui pendekatan bibliometrik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi relevansi prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* dalam diskursus etika komunikasi politik global, serta memberikan rekomendasi penguatan nilai-nilai etika dalam komunikasi politik berbasis prinsip syariah untuk meminimalisir polarisasi politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kerangka etika komunikasi politik yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika komunikasi politik berbasis Islam dalam menghadapi tantangan polarisasi politik di era media sosial. Dengan meningkatnya polarisasi politik yang diperparah oleh media sosial, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis dan normatif. Integrasi prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* dalam diskursus etika komunikasi politik dapat menjadi solusi dalam membangun komunikasi politik yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menjawab tantangan tersebut dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi politik yang berbasis nilai-nilai Islam.

### **Konsep Polarisasi Politik**

Polarisasi politik merupakan fenomena yang menggambarkan perbedaan tajam dalam sikap politik masyarakat, yang cenderung mengarah pada ekstremisme ideologis dan peningkatan antagonisme antar kelompok politik (Piazza, 2023; Schedler, 2023). Fenomena ini dapat mengakibatkan masyarakat terbagi menjadi dua kutub yang saling bertentangan, sehingga menghambat dialog konstruktif dan kompromi dalam proses

demokrasi. Menurut Pew Research Center, polarisasi politik di Amerika Serikat telah mencapai tingkat tertinggi dalam beberapa dekade terakhir, dengan perbedaan ideologis yang semakin tajam antara partai politik utama dan pendukungnya (Wasi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa polarisasi politik bukan hanya sekadar perbedaan pendapat, tetapi juga mencerminkan perpecahan sosial yang mendalam yang dapat mengancam stabilitas demokrasi.

### **Manifestasi Polarisasi Politik**

Manifestasi dari polarisasi politik dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, termasuk dalam perilaku pemilih, retorika politik, dan penggunaan media sosial. Salah satu bentuk manifestasi yang paling mencolok adalah meningkatnya "affective polarization", yaitu kecenderungan individu untuk merasakan ketidaksukaan atau bahkan kebencian terhadap kelompok politik yang berbeda pandangan (Shoai, 2025; Versteegen, 2024). Penelitian oleh Iyengar dan Westwood (2015) menunjukkan bahwa affective polarization dapat menyebabkan individu menilai lawan politiknya secara negatif, terlepas dari kebijakan atau tindakan yang sebenarnya (Berntzen et al., 2024; Rustandi et al., 2024). Selain itu, media sosial telah memperkuat polarisasi ini dengan menciptakan "echo chambers" di mana individu hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangan mereka, sehingga memperkuat keyakinan dan mengurangi keterbukaan terhadap pandangan alternatif.

### **Definisi Konsep Etika Komunikasi Politik**

Etika komunikasi politik merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana pesan politik disampaikan dan diterima dalam masyarakat. Etika ini mencakup aspek kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap lawan politik dan publik. Menurut Kulachai et al (2024), etika komunikasi politik yang baik harus menghindari manipulasi, misinformasi, dan retorika yang memecah belah, serta mendorong dialog yang konstruktif dan inklusif. Dengan demikian, etika komunikasi politik berperan penting dalam menjaga integritas proses demokrasi dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi politik.

### **Manifestasi Etika Komunikasi Politik**

Dalam praktiknya, etika komunikasi politik dapat dimanifestasikan melalui berbagai cara, seperti penggunaan bahasa yang santun, penyampaian informasi yang akurat, dan keterbukaan terhadap kritik dan dialog. Namun, dalam konteks politik kontemporer, seringkali terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika ini, seperti penyebaran hoaks, kampanye negatif, dan penggunaan retorika yang memecah belah (Deshpande, 2025; Suhendar & Halimi, 2023). Studi oleh Van't Riet & Van Stekelenburg (2022) menyoroti bahwa pelanggaran etika komunikasi politik dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat partisipasi politik yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi aktor politik dan media untuk mematuhi standar etika komunikasi guna menjaga kualitas demokrasi dan kohesi sosial.

### **Konsep Siyasah Syar'iyah**

Siyasah Syar'iyah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kebijakan atau tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Maimun & Hakim, 2023; Zainuddin et al., 2022). Konsep ini memberikan fleksibilitas bagi pemimpin untuk membuat keputusan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan moralitas Islam. Menurut Maimun & Hakim (2023), Siyasah Syar'iyah memungkinkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola pemerintahan modern, termasuk dalam bidang legislasi dan kebijakan publik. Dengan demikian, Siyasah Syar'iyah berperan sebagai kerangka normatif dalam mengatur kehidupan politik dan sosial dalam masyarakat Islam.

### **Manifestasi Siyasah Syar'iyah**

Manifestasi Siyasah Syar'iyah dalam praktik pemerintahan dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti pembuatan undang-undang yang berorientasi pada keadilan sosial, kebijakan publik yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan penegakan hukum yang adil dan transparan. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah dapat ditemukan dalam upaya harmonisasi antara hukum nasional dan nilai-nilai Islam, seperti dalam pembentukan peraturan daerah yang berbasis syariah (Aulia et al., 2025). Penelitian oleh Dzimar & Ghazlan (2025) menunjukkan bahwa Siyasah Syar'iyah dapat menjadi landasan dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, dengan tetap menghormati pluralisme dan hak asasi manusia. Dengan demikian, Siyasah Syar'iyah memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan-tantangan politik dan sosial di era modern.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena polarisasi politik dalam era media sosial melalui kajian literatur ilmiah global serta eksplorasi nilai-nilai Siyasah Syar'iyah dalam diskursus etika komunikasi politik. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis semua penelitian yang relevan dengan topik yang sedang dikaji secara sistematis dan transparan (Creswell, J. W., & Poth, 2018).

Proses SLR dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Publish or Perish* untuk mengumpulkan data dari basis data seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*, dengan kata kunci "political polarization", "social media", "ethics in political communication", dan "Siyasah Syar'iyah", serta batasan waktu publikasi antara tahun 2015 hingga 2025.

Artikel yang terpilih dievaluasi kualitasnya berdasarkan relevansi, metodologi, dan kontribusinya terhadap bidang studi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak *VOSviewer* untuk melakukan analisis bibliometrik, yang

mencakup visualisasi jaringan kata kunci, penulis, dan institusi, serta identifikasi kluster penelitian dan tren topik yang berkembang (Van Eck & Waltman, 2010).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan Hadis sebagai kerangka analisis normatif untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip Siyash Syar'iyah dalam komunikasi politik (Al-Jaza'iri, 2003; Hamka, 2012; Al-Maraghi, 1910). Analisis data dilakukan berdasarkan model Miles, Huberman, dan Saldana (2020), yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, untuk menstrukturkan temuan secara sistematis. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil analisis SLR, bibliometrik, dan interpretasi prinsip-prinsip etika komunikasi dalam Siyash Syar'iyah, guna memastikan keandalan dan validitas hasil penelitian dalam mengkaji polarisasi politik dalam era media sosial melalui perspektif Islam (Flick, 2020).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Polarisasi Politik dan Dinamika Media Sosial

Fenomena polarisasi politik di era digital telah menjadi isu yang signifikan, terutama dengan peran media sosial sebagai platform utama dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Media sosial memungkinkan individu untuk berinteraksi secara luas, namun juga dapat memperkuat perbedaan pandangan yang tajam, menciptakan kelompok-kelompok yang saling berseberangan dalam pandangan politik (Boulianne et al., 2023; Keijzer et al., 2024). Hal ini diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten yang sejalan dengan preferensi pengguna, membentuk apa yang disebut sebagai echo chamber, di mana individu hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri.

Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai pentingnya menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Allah SWT berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 103:

*"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai..."*

Ayat ini menekankan pentingnya kesatuan umat dan larangan terhadap perpecahan, yang relevan dalam konteks polarisasi politik saat ini. Perpecahan yang timbul akibat perbedaan pandangan politik dapat merusak tatanan sosial dan melemahkan solidaritas umat. Lebih lanjut, Al-Qur'an juga memperingatkan tentang bahaya mengikuti jalan-jalan yang menyimpang yang dapat menyebabkan perpecahan. Dalam Surah Al-An'am ayat 153, Allah SWT berfirman:

*"Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya..."*

Ayat ini mengajarkan bahwa mengikuti jalan yang lurus, yaitu ajaran Allah, akan membawa kepada persatuan, sedangkan mengikuti jalan-jalan yang lain akan menyebabkan perpecahan. Dalam konteks media sosial, hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya mengikuti nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam berkomunikasi, serta

menghindari penyebaran informasi yang dapat memecah belah umat. Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya memperbaiki hubungan antara sesama mukmin yang berselisih. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 10, Allah SWT berfirman:

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."*

Ayat ini menggarisbawahi bahwa sesama mukmin adalah bersaudara, dan apabila terjadi perselisihan, maka wajib bagi mereka untuk mendamaikannya. Dalam konteks polarisasi politik di media sosial, ayat ini mengajarkan pentingnya dialog yang konstruktif dan upaya untuk menyatukan perbedaan demi menjaga ukhuwah Islamiyah.

Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas dalam menghadapi polarisasi politik di era media sosial. Nilai-nilai persatuan, keadilan, dan ukhuwah harus dijunjung tinggi dalam setiap interaksi, termasuk dalam ranah digital, untuk mencegah perpecahan dan menjaga keharmonisan umat.

### **Etika Komunikasi Politik: Perspektif Global dan Siyasah Syar'iyah**

Dalam era digital yang ditandai oleh arus informasi yang cepat dan luas, komunikasi politik memainkan peran sentral dalam membentuk opini publik dan arah kebijakan. Namun, dinamika ini sering kali diwarnai oleh penyebaran informasi yang tidak akurat, retorika yang memecah belah, dan manipulasi emosional yang dapat merusak tatanan sosial (Marino et al., 2024; Pierce et al., 2022). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang standar etika yang seharusnya mengatur komunikasi politik di tingkat global.

Secara global, etika komunikasi politik menekankan prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perbedaan (Davis, 2023). Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini sering terjadi, baik melalui penyebaran berita palsu maupun penggunaan bahasa yang provokatif. Hal ini menunjukkan perlunya landasan etika yang kuat dan universal dalam komunikasi politik.

Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip etika komunikasi politik tercermin dalam konsep Siyasah Syar'iyah, yang mengatur tata kelola pemerintahan dan interaksi sosial berdasarkan nilai-nilai syariah (Mahmad Robbi & Syed Azman, 2025). Konsep ini menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan politik dan komunikasi.

Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai etika komunikasi. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 6, Allah SWT berfirman:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."*

Ayat ini menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, untuk menghindari dampak negatif seperti polarisasi politik yang disebabkan oleh

penyebaran informasi yang tidak benar. Selain itu, dalam Surah Al-Ahzab ayat 70, Allah SWT berfirman:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."*

Ayat ini mengajarkan bahwa komunikasi harus didasarkan pada kebenaran dan ketakwaan, yang merupakan inti dari etika komunikasi politik dalam Islam. Konsep Siyash Syar'iyah juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."*

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dan tanggung jawab adalah prinsip utama dalam kepemimpinan dan komunikasi politik. Dengan demikian, etika komunikasi politik dalam perspektif global dan Islam menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam komunikasi politik dapat membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis dan adil.

**Tabel 1.** Nilai-Nilai Etika Komunikasi Politik: Perspektif Global dan Siyash Syar'iyah

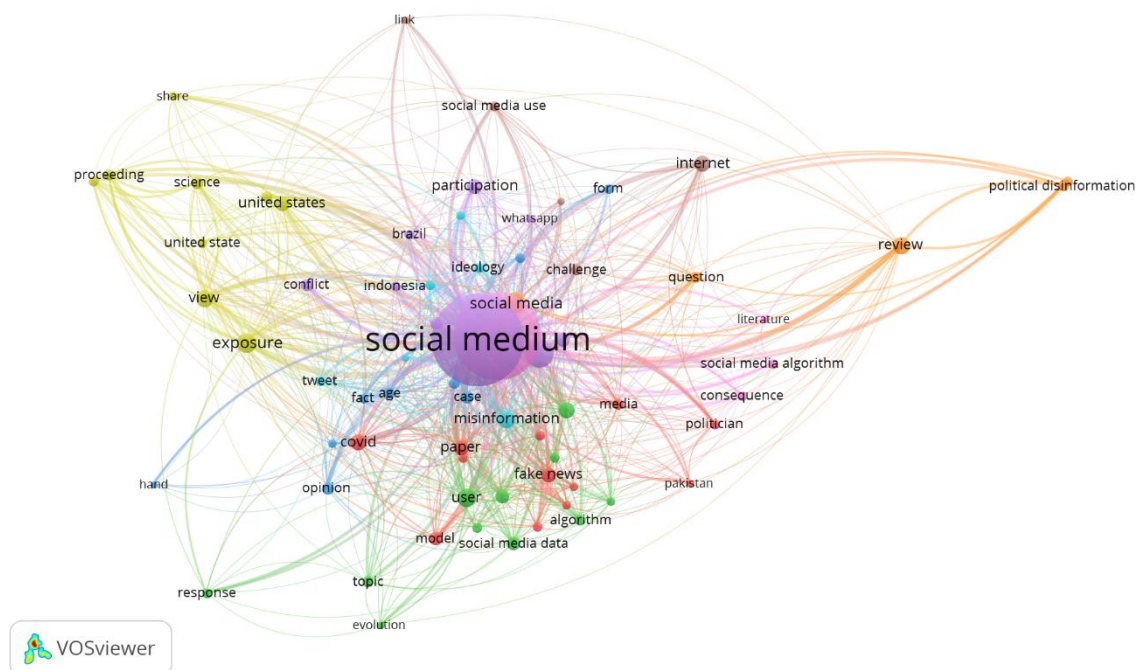
<b>Aspek Etika Komunikasi Politik</b>	<b>Perspektif Global</b>	<b>Perspektif Siyash Syar'iyah (Al-Qur'an)</b>
Kejujuran	Transparansi dalam penyampaian pesan, menghindari hoaks	Berkata benar, menghindari fitnah (QS. Al-Ahzab: 70; Al-Hujurat: 6)
Keadilan	Perlakuan setara tanpa diskriminasi	Menyampaikan informasi secara adil (QS. An-Nisa: 58)
Tanggung Jawab	Memastikan informasi berdampak positif bagi publik	Bertanggung jawab atas dampak ucapan (QS. Al-Hujurat: 10)
Persatuan	Membangun dialog inklusif untuk mencegah konflik	Menghindari perpecahan, menjaga ukhuwah (QS. Ali Imran: 103)
Verifikasi Informasi	Cek fakta sebelum menyebarkan informasi	Tabayyun atas berita (QS. Al-Hujurat: 6)

Tabel 1 memperlihatkan keselarasan antara prinsip-prinsip etika komunikasi politik dalam perspektif global dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam melalui konsep Siyash Syar'iyah. Keduanya menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, tanggung jawab, persatuan, dan verifikasi informasi dalam praktik komunikasi politik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam praktik komunikasi politik,

diharapkan dapat tercipta lingkungan politik yang lebih etis, adil, dan harmonis, baik dalam konteks global maupun dalam masyarakat Muslim.

### Analisis Bibliometrik Polarisasi Politik: Temuan VOSviewer

Analisis bibliometrik melalui network visualization VOSviewer menunjukkan bahwa penelitian mengenai polarisasi politik dalam era media sosial terstruktur dalam kluster yang saling terkait dan membentuk pola keterhubungan yang kompleks. Visualisasi ini menggambarkan hubungan erat antara kata kunci utama seperti social media, misinformation, fake news, political disinformation, social media algorithm, politician, consequence, dan participation, yang menjadi pusat gravitasi dalam jaringan penelitian ini. Node "social medium" muncul sebagai simpul utama (central node) dengan ukuran signifikan, menunjukkan bahwa diskusi mengenai media sosial merupakan fokus utama dalam literatur yang dianalisis.



**Gambar 1.** Network Analysis

Lebih jauh, visualisasi pada gambar 1 memperlihatkan adanya kluster dominan yang terhubung kuat, seperti kluster political disinformation yang terhubung erat dengan fake news, social media algorithm, dan review. Kluster ini menunjukkan konsentrasi penelitian pada isu disinformasi politik dan penyebaran hoaks di platform media sosial, memperlihatkan betapa pentingnya pemahaman tentang peran algoritma dalam memengaruhi persebaran informasi yang dapat memicu polarisasi politik. Kluster politician dan consequence yang terhubung dengan social media dan political disinformation mencerminkan fokus penelitian pada dampak langsung dari polarisasi politik terhadap perilaku aktor politik, opini publik, dan kebijakan pemerintahan.

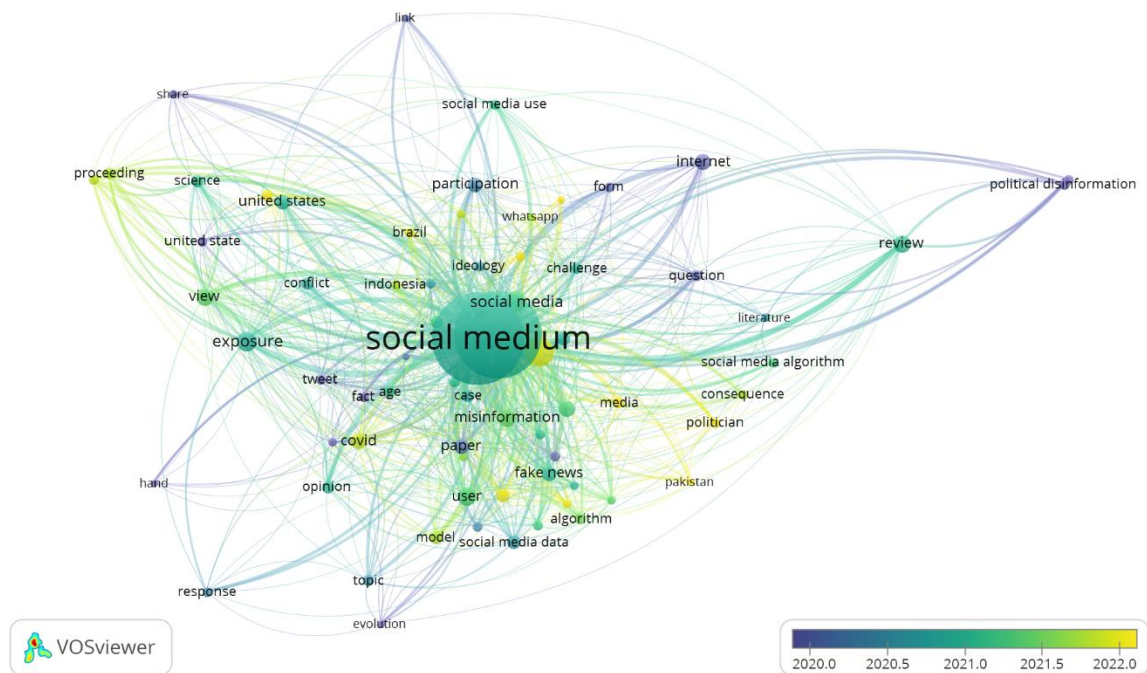
Selain itu, visualisasi menunjukkan adanya koneksi lintas negara, seperti Indonesia, Brazil, United States, dan Pakistan, yang mempertegas bahwa isu polarisasi politik dalam media sosial merupakan fenomena global yang tidak terbatas pada wilayah tertentu. Konteks lokal seperti Indonesia ditandai dengan keterhubungan kata kunci ideology, conflict, dan participation, yang menunjukkan adanya perhatian terhadap dinamika perbedaan ideologi dan partisipasi politik yang terfragmentasi akibat paparan media sosial.

Dalam konteks nilai-nilai Islam, fenomena ini harus dilihat melalui kerangka Siyash Syar'iyah, yang menekankan pentingnya prinsip keadilan (al-'adl), persatuan (ittihad), dan kebenaran dalam komunikasi. Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 menekankan pentingnya tabayyun, atau verifikasi informasi, sebagai upaya untuk mencegah fitnah dan perpecahan:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."*

Ayat ini sangat relevan dalam konteks polarisasi politik di era digital, di mana penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat menciptakan konflik sosial yang luas. Prinsip ini mendukung perlunya etika komunikasi politik berbasis nilai Islam untuk membangun ruang diskusi yang sehat dan harmonis.

Sebagai kesimpulan awal, visualisasi ini menunjukkan bahwa literatur global terkait polarisasi politik dalam era media sosial masih terfokus pada isu-isu misinformasi, algoritma, dan peran aktor politik, sementara nilai-nilai etika komunikasi Islam masih minim diintegrasikan dalam diskursus ini. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi politik berbasis nilai-nilai Siyash Syar'iyah agar komunikasi politik di media sosial dapat diarahkan menuju kebaikan bersama dan terhindar dari praktik-praktik yang merusak persatuan umat.



**Gambar 2.** Overlay Analysis

Overlay visualization pada gambar 2 dari hasil analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer menunjukkan distribusi temporal dan evolusi fokus penelitian terkait polarisasi politik dalam era media sosial. Warna pada visualisasi ini merepresentasikan rentang waktu publikasi, dengan spektrum warna yang bergerak dari biru tua (tahun 2020) hingga kuning terang (tahun 2022). Node dengan ukuran besar dan warna mencolok, seperti social medium, social media, misinformation, fake news, dan political disinformation, menunjukkan topik-topik dominan yang terus menjadi pusat perhatian dalam literatur selama tiga tahun terakhir.

Hasil overlay ini mengindikasikan bahwa penelitian tentang polarisasi politik dalam media sosial mengalami peningkatan intensitas seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan dinamika politik global. Kata kunci seperti political disinformation, fake news, dan social media algorithm menunjukkan warna kuning terang, menandakan bahwa fokus penelitian pada topik-topik ini muncul sebagai tren terbaru dalam literatur. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akademik terhadap dampak algoritma media sosial dalam menciptakan echo chambers, penyebaran misinformasi, dan memperkuat polarisasi politik. Sebaliknya, topik seperti participation, exposure, dan conflict yang muncul dalam warna biru kehijauan menunjukkan bahwa meskipun penting, topik-topik ini telah menjadi fokus penelitian lebih awal pada periode 2020-2021. Temuan ini menunjukkan bahwa penelitian tentang partisipasi politik di media sosial telah mendahului studi yang lebih spesifik tentang disinformasi politik dan peran algoritma dalam polarisasi.

Kata kunci Indonesia, Brazil, United States, dan Pakistan muncul sebagai node dengan konektivitas yang luas, menandakan adanya relevansi global dari isu polarisasi politik dalam konteks media sosial. Namun demikian, distribusi temporal

menunjukkan bahwa penelitian di negara-negara berkembang, seperti Indonesia dan Pakistan, cenderung masih dalam tahap berkembang (dengan warna lebih tua), sedangkan topik-topik baru seperti political disinformation dan algorithm didominasi oleh penelitian terbaru di negara-negara Barat. Dari perspektif nilai-nilai Islam, overlay ini menegaskan urgensi penerapan prinsip Siyash Syar'iyah dalam merespons tren polarisasi politik di media sosial. Al-Qur'an memberikan pedoman tegas terkait pentingnya menjaga kesatuan umat dan berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah Ali Imran ayat 103:

*"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai..."*

Prinsip ini mengajarkan pentingnya persatuan dalam menghadapi perbedaan pendapat dan menghindari perpecahan akibat penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 6, Allah SWT memperingatkan:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."*

Ayat ini menjadi dasar penting dalam menghindari penyebaran hoaks yang dapat memperburuk polarisasi politik.

Secara keseluruhan, overlay visualization ini menegaskan bahwa literatur akademik tentang polarisasi politik di era media sosial semakin berkembang ke arah studi tentang disinformasi politik, algoritma media sosial, dan dampaknya terhadap opini publik. Namun demikian, penelitian yang mengkaji integrasi nilai-nilai etika komunikasi Islam, khususnya perspektif Siyash Syar'iyah, masih sangat terbatas. Hal ini membuka ruang penting untuk penelitian lanjutan yang mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Islam tentang keadilan (al-'adl), kebenaran (haqq), dan persatuan (ittihad) dapat menjadi landasan etika komunikasi politik dalam menghadapi polarisasi politik di ruang digital.

### **Siyash Syar'iyah dalam Konteks Polarisasi Politik di Era Digital**

Polarisasi politik yang semakin tajam di era digital, terutama melalui media sosial, menimbulkan tantangan serius terhadap stabilitas sosial dan kesatuan umat (Octavianne et al., 2024). Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Siyash Syar'iyah yakni tata kelola pemerintahan berdasarkan syariat Islam menawarkan kerangka etik dan normatif untuk merespons dinamika tersebut secara bijaksana dan berkeadilan (Dzimar & Ghazlan, 2025; Kholil et al., 2024).

Siyash Syar'iyah menekankan pentingnya keadilan (al-'adl), kemaslahatan umum (maslahah), dan musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan politik. Prinsip-prinsip ini relevan dalam mengatasi polarisasi politik, di mana penyebaran informasi yang tidak akurat dan ujaran kebencian sering kali memperkeruh suasana. Al-Qur'an mengingatkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 6: Ayat ini menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, sebuah prinsip yang sangat relevan dalam konteks media sosial saat ini. Dengan demikian, penerapan Siyash Syar'iyah mendorong para

pemimpin dan masyarakat untuk mengedepankan etika komunikasi yang bertanggung jawab, guna mencegah perpecahan dan menjaga keharmonisan sosial.

Selain itu, prinsip musyawarah dalam Siyasah Syar'iyah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi deliberatif, di mana keterlibatan publik dianggap penting untuk mencapai keputusan yang adil dan inklusif. Dalam konteks ini, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas partisipasi politik yang konstruktif, asalkan digunakan dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah dalam praktik politik di era digital, diharapkan dapat tercipta tatanan sosial yang lebih adil, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini memerlukan komitmen bersama dari para pemimpin, tokoh agama, dan masyarakat untuk mengedepankan etika komunikasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan politik.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa polarisasi politik di era digital, khususnya yang diperkuat melalui media sosial, menjadi tantangan krusial dalam menjaga keharmonisan masyarakat dan stabilitas politik. Temuan dari analisis bibliometrik mengungkapkan bahwa diskusi ilmiah mengenai polarisasi politik sebagian besar berfokus pada isu-isu seperti misinformasi, berita palsu, dan pengaruh algoritma media sosial. Namun, studi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika Islam, khususnya kerangka Siyasah Syar'iyah, dalam diskursus komunikasi politik masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penting dalam literatur dan menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam analisis praktik komunikasi politik.

Prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah yang menekankan keadilan (al-'adl), kemaslahatan bersama (maslahah), kejujuran (sidq), dan musyawarah (shura) menawarkan pedoman normatif dalam menghadapi tantangan polarisasi politik di era digital. Dengan menyelaraskan praktik komunikasi politik dengan nilai-nilai etika ini, diharapkan tercipta diskursus publik yang lebih inklusif, adil, dan harmonis yang menghargai perbedaan, sekaligus mendorong tercapainya kemaslahatan bersama. Selain itu, penelitian ini menekankan urgensi bagi para aktor politik, akademisi, dan masyarakat umum untuk mengadopsi pendekatan kritis dan etis dalam menggunakan platform digital, memastikan kebebasan berekspresi tetap sejalan dengan tanggung jawab menjaga kohesi sosial. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mengeksplorasi integrasi prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah dalam ranah politik digital, serta mengkaji bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan secara praktis dalam pembuatan kebijakan, wacana politik, dan partisipasi masyarakat. Temuan dari studi ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan kerangka etika yang mampu menjawab tantangan komunikasi politik yang terus berkembang di era digital, sekaligus berkontribusi pada terciptanya lanskap politik yang lebih etis dan seimbang.

## REFERENSI

- Aulia, U., Apriyanda, R., & Florenchia, V. (2025). Urgensi Legislasi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional. *Equality: Law and Social*, 1(1), 12–20.
- Berntzen, L. E., Kelsall, H., & Harteveld, E. (2024). Consequences of affective polarization: Avoidance, intolerance and support for violence in the United Kingdom and Norway. *European Journal of Political Research*, 63(3), 927–949.
- Boulianne, S., Oser, J., & Hoffmann, C. P. (2023). Powerless in the digital age? A systematic review and meta-analysis of political efficacy and digital media use. *New Media & Society*, 25(9), 2512–2536.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. Sage publications.
- Davis, A. (2023). *Political communication: An introduction for crisis times*. John Wiley & Sons.
- Demirduzen, C. (2025). *The Role of Local Governments in Migrant Integration: A Case Study of Dutch Municipalities*.
- Deshpande, K. (2025). *Psychological Warfare in Political Campaigns*. Educohack Press.
- Din, S. U., Syed Ismail, S. H., & Raja Sulong, R. H. (2024). Combating corruption based on Al-Siyasah al-Syar'iyah perspective: a literature review. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 776–807.
- Dzimar, A., & Ghazlan, E. (2025). The Urgency of Implementing Siyasah Syar'iyah Values in National Law-Making: Harmonizing Islamic Governance Principles with Constitutional Democracy. *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 1(4), 172–179.
- Keijzer, M. A., Mäs, M., & Flache, A. (2024). Polarization on social media: Micro-level evidence and macro-level implications. *JASSS*, 27(1), 7.
- Kholil, S., Ismail, I., Dalimunthe, M. A., Suhendar, A., & Rambe, R. F. A. K. (2024). Strengthening Religious Moderation through PTKIN and SIT Collaboration to Build Social Harmony. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, 9(2), 228–236.
- Kulachai, W., Chayanon, S., & Srisorn, W. (2024). Political communication and political success: The art of effective messaging. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 45(2), 681–694.
- Mahmad Robbi, A. A., & Syed Azman, S. M. M. (2025). Shari 'ah committees' perspective on Al-Siyasah al-Shar 'iyah's vis-à-vis Shari'ah governance conception within Malaysian

- Islamic financial institutions. *Qualitative Research in Financial Markets*.
- Maimun, M., & Hakim, D. A. (2023). Siyāsah Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 111–130.
- Marino, E. B., Benitez-Baleato, J. M., & Ribeiro, A. S. (2024). The polarization loop: How emotions drive propagation of disinformation in online media—The case of conspiracy theories and extreme right movements in southern Europe. *Social Sciences*, 13(11), 603.
- Octavianne, H., Suhariadi, F., Mudzakkir, M. F., Trianto, D., & Chamdan, U. (2024). Identity Politics and Polarization in Contemporary Muslim Countries: The Impact of Elections, Social Media, and Global Dynamics. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 3(2), 263–286.
- Papathanassopoulos, S., & Giannouli, I. (2025). Political communication in the age of platforms. *Encyclopedia*, 3(2), 77.
- Piazza, J. A. (2023). Political polarization and political violence. *Security Studies*, 32(3), 476–504.
- Pierce, G. L., Holland, C. C., Cleary, P. F., & Rabrenovic, G. (2022). The opportunity costs of the politics of division and disinformation in the context of the twenty-first century security deficit. *SN Social Sciences*, 2(11), 241.
- Qureshi, I., & Bhatt, B. (2024). Social media-induced polarisation. *Information Systems Journal*, 34(4).
- Rustandi, A. M., Suhendar, A., & Dalimunthe, M. A. (2024). Polygamy in the Lens of Generation Z: A Communication Psychology Perspective. *Kommunika*, 20(01), 18–25.
- Schedler, A. (2023). Rethinking political polarization. *Political Science Quarterly*, 138(3), 335–359.
- Shoai, A. (2025). Intergroup hostility in the public sphere: Systematizing the rising concern for affective polarization beyond partisan lines. *International Journal of Public Opinion Research*, 37(4), edaf044.
- Suhendar, A., & Halimi, M. (2023). The Role of Anti-Bullying Change Agents in Shaping Civic Dispositions to Tackle Bullying Behavior. *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education*, 2, 903–913.
- Suhendar, A., Syam, A. M., & Ritonga, A. R. (2023). Efektivitas Instagram Sebagai Ruang Motivasi Hijrah Mahasiswa IAIN Lhokseumawe. *Kommunika*, 19(02), 12–20.
- Syam, A. M., Dalimunthe, M. A., Suhendar, A., & Rambe, R. F. A. K. (2024). Islamic Philosophy: A Comparative Perspective Between Ibnu Khaldun And Karl Marx.

- SYAHADAT: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 55-72.
- Taneja, V. (2024). Social media and Indian politics: Its Evolution through history to the catalyst, influencer and contender in 21st century. *Issue 1 Int'l JL Mgmt. & Human.*, 7, 2556.
- Van't Riet, J., & Van Stekelenburg, A. (2022). The effects of political incivility on political trust and political participation: A meta-analysis of experimental research. *Human Communication Research*, 48(2), 203-229.
- Van Eck, N., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538.
- Versteegen, P. L. (2024). We love, they hate: Emotions in affective polarization and how partisans may use them. *Political Psychology*, 45(6), 1031-1049.
- Wasi, I. (2025). Sistem Kepartaian di Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah Studi Komparasi Politik. *Jurnal Silatene Sosial Humaniora*, 3(2), 42-52.
- Yarchi, M., Baden, C., & Kligler-Vilenchik, N. (2024). Political polarization on the digital sphere: A cross-platform, over-time analysis of interactional, positional, and affective polarization on social media. In *Computational Political Communication* (pp. 98-139). Routledge.
- Zainuddin, Z., Efendi, R., Mirdad, J., & Yaacob, S. E. (2022). Siyāsah Shar'īyyah and the Politicization of Religion in the 2019 Indonesian Presidential Election. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2).